

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD KABUPATEN ACEH BESAR

Intan Rizkia Chudri^{1*}, Elviza², Tarmizi Gadeng³, Muhammad Alfata⁴, Ita Silfia Dewi⁵

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah, No 92 Batoh Lueng Bata Banda Aceh 23245

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah, No 92 Batoh Lueng Bata Banda Aceh 23245

³Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah, No 92 Batoh Lueng Bata Banda Aceh 23245

⁴Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah, No 92 Batoh Lueng Bata Banda Aceh 23245

⁵Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah, No 92 Batoh Lueng Bata Banda Aceh 23245

*E-mail koresponden: intan.rizkia@unmuha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Data penelitian dikumpulkan melalui daftar pertanyaan/kuisisioner dan studi dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji bersama-sama dan uji parsial dimaksud untuk mengetahui secara bersama-sama dan secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Penelitian ini fokus tentang Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan Peran audit internal berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Ukuran sampel penelitian ini sebanyak 74 pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara uji simultan antara variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan peran audit internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Secara parsial yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Peran audit internal berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.

Kata kunci : *Penerapan standar akuntansi pemerintahan, Kompetensi Aparatur Peran audit internal dan Kualitas Laporan Keuangan*

PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat



dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kualitas laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat yang akan berpengaruh terhadap pemberian opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di antaranya penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal (Handayani, 2020).

Kualitas informasi laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Penerapan standar akuntansi pemerintah yang kurang tepat atau tidak mudah dipahami oleh aparatur akan berdampak pada kualitas informasi laporan keuangan. Penerapan Penerapan standar akuntansi pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar seperti prosedur laporan realisasi anggaran, laporan perubahan arus saldo, laporan operasional dan lainnya. Permasalahan yang terjadi kurangnya ketelitian aparatur. Kualitas laporan keuangan dan penilaiannya yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten Aceh Besar harus benar agar pelaksanaan audit internal layak. Audit internal pada SKPD Kabupaten Aceh Besar dapat memberikan manfaat bagi aparatur seperti dapat memberikan nilai tambah kepada aparatur, memberikan rekomendasi yang baik, kesadaran aparatur dalam bertanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan memberikan akses yang diperlukan untuk auditor internal dalam melaksanakan audit berupa informasi, fasilitas maupun catatan.

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu peran audit internal (Martaningsih, 2016). Sistem akan berjalan baik apabila ada peran audit internal yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas informasi laporan keuangan yang bermutu. Maka oleh sebab itu perlu adanya peran audit internal dalam pengelolaan anggaran daerah, agar semua proses berjalan

dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan yang bermutu.

Kompetensi aparatur sangat penting bagi SKPD Kabupaten Aceh Besar, kurang kompetensi akan berdampak pada kualitas informasi laporan keuangan. Rendahnya kemampuan aparatur, keterampilan, pemahaman dan pengetahuan menjadi salah satu fenomena yang tertarik untuk diteliti. Dengan adanya kompetensi aparatur SKPD Kabupaten Aceh Besar maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat dan efektif serta efisien. Hal ini dapat terjadi jika kompetensi aparatur yang dimanfaatkan telah didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang diakui, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi pemerintahan, sumber daya manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

KAJIAN LITERATUR

Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2018:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau pada periode tertentu. Menurut Harahap (2018:105) laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun laporan keuangan yang lazim dikenal adalah laba/rugi atau hasil usaha, neraca, laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan.

Kualitas informasi laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Definisi Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan daerah diartikan sebagai suatu proses pencatatan, suatu proses dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode

merupakan bentuk pertanggungjawab pemerintah kepada rakyat atas dana publik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah selaku penyedia laporan keuangan daerah harus menyediakan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Untuk itulah pemerintah memerlukan suatu standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut (Handayani, 2020:274).

Informasi dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Oleh sebab itu, keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna, namun disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun (Martaningsih, 2016:31).

Tujuan Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Agar tidak salah dalam memakai informasi (laporan akuntansi) ini, maka perlu diketahui secara benar pengertian dari proses akuntansi. Menurut IAI PSAK (2018) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.
2. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas kegunaan sumber - sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuangangan dan kerugian dan arus kas.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Definisi Akuntansi Pemerintahan

Menurut Halim dan Kusufi (2018:143) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang tepat dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Menurut Baswir (2017:7), Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba.

Definisi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mahsun (2018: 65) menjelaskan penerapan standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah menetapkan standar akuntansi untuk pemerintah yang disebut dengan SAP (Standar akuntansi pemerintah). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Mahmudi (2018: 271). SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan ditetapkannya SAP, diharapkan dapat terciptanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mahmudi (2018: 271), standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berikut adalah manfaat standar akuntansi pemerintahan (Ningtyas, 2017:4):

1. Standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan;
2. Standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya;

3. Standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan;
4. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan;
5. Standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

Kompetensi Aparatur

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2017 pasal 1 tentang kompetensi, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional.

Peran Audit Internal

Menurut Arrens *et al.*, (2016:4) audit merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian intern dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan supaya dapat mendeteksi terjadinya penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan oleh perusahaan. Proses audit sangat diperlukan suatu perusahaan karena dengan proses tersebut seorang akuntan publik dapat memberikan pernyataan pendapat terhadap kewajaran atau kelayakan laporan keuangan berdasarkan international standards auditing yang berlaku umum. Untuk memahami pengertian audit secara baik, berikut ini pengertian audit menurut pendapat beberapa ahli akuntansi.

Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan, salah satunya adalah

penelitian dari Martaningsih (2016) dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan penewrapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran internal audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating.

Rahmawati (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitiannya ini menyimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Suprihatin (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan antara variable penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan dan hubungan antara SIA dengan kualitas laporan keuangan berdasarkan pengolahan data yang diperoleh memiliki hubungan yang positif dan signifikan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 74 orang (Berdasarkan judul penelitian dan berdasarkan penelitian sebelumnya secara rata-rata setiap SKPD hanya menggunakan sampel antara 1 sampai 2 aparatur, maka sampel dalam penelitian ini hanya pegawai di Bidang Laporan Keuangan dan Bidang Akuntansi di setiap SKPD). Menurut Notoatmodjo (2017:115). Alasan peneliti hanya menjadikan sampel dibidang laporan keuangan dan bidang akuntansi karena kedua pegawai tersebut di setiap instansi mempunyai hubungan langsung dengan penyusunan laporan keuangan SKPD Kabupaten Aceh Besar dan dapat mewakili masing-masing SKPD.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1
Jumlah SKPD Kabupaten Aceh Besar

No	Nama SKPD Aceh Besar	Pegawai Bidang Akuntansi	Pegawai Bidang Laporan Keuangan	Jumlah Sampel
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1	1	2
2	Dinas Kesehatan	1	1	2
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	2
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1	1	2
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah	1	1	2
6	Dinas Sosial	1	1	2
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1	1	2
8	Dinas Pangan	1	1	2
9	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	2
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1	1	2
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong	1	1	2
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP Dan PA	1	1	2
13	Dinas Perhubungan	1	1	2
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1	1	2
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	1	1	2
16	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	1	1	2
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1	1	2
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1	1	2
19	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	1	1	2
20	Dinas Pertanian	1	1	2
		1	1	2

No	Nama SKPD Aceh Besar	Pegawai Bidang Akuntansi	Pegawai Bidang Laporan Keuangan	Jumlah Sampel
22	PPKD	1	1	2
23	DPRK	1	1	2
24	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	1	1	2
25	Sekretariat Daerah	1	1	2
26	Sekretariat DPRK	1	1	2
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	1	2
28	Inspektorat	1	1	2
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	1	1	2
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	2
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	1	2
32	Dinas Syariat Islam	1	1	2
33	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2
34	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	2
35	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1	1	2
36	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	1	1	2
37	Sekretariat Baitul Mal	1	1	2
Jumlah		37	37	74

Sumber: Kabupaten Aceh Besar (2022)

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang efektif karena dapat diperolehnya data standar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan analisis menyeluruh tentang karakteristik populasi yang diteliti. Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan kepada salah satu pegawai untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada pegawai tersebut sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Definisi dan Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 4 variabel, yaitu masing-masing variabel terikat yaitu kualitas informasi laporan keuangan, variabel bebas yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal.

Variabel-variabel tersebut dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Dependen				
1	Kualitas informasi laporan keuangan (Y)	Diartikan sebagai suatu proses pencatatan, suatu proses dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode merupakan bentuk pertanggungjawab pemerintah kepada rakyat atas dana publik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. (Munawir, 2017:9).	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami (Munawir, 2017:9).	Likert
Independen				
2	Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X ₁)	Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010)	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan perubahan saldo 3. Laporan operasional 4. Laporan perubahan equitas 5. Neraca 6. Laporan arus kas 7. Catatan atas laporan keuangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010)	Likert

3	Kompetensi aparatur (X ₂)	Kompetensi aparatur adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh aparatur sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar dan lain-lain (Munawir, 2017:16)	1. Kemampuan 2. Keterampilan 3. Pemahaman 4. Pengetahuan (Munawir, 2017:16)	Likert
4	Peran audit internal (X ₃)	Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. (Tugiman, 2017:11)	1. Kelayakan 2. Respon dari objek yang diperiksa 3. Profesionalisma 4. Peringatan dini 5. Kehematan biaya pemeriksaan 6. Pengembangan 7. Umpan balik 8. Meningkatnya jumlah pemeriksaan 9. Tercapainya program pemeriksaan	Likert

Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan uji simultan dan uji parsial dengan menggunakan software SPSS (*Statistica Product and Service Solutions*) versi 22. Adapun persamaan model regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kualitas informasi laporan keuangan
- X₁ = Penerapan standar akuntansi pemerintahan
- X₂ = Kompetensi aparatur
- X₃ = Peran audit internal
- A = Konstanta
- b₁, b₂, b₃ = Parameter Regresi
- e = *Error Term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis

Hipotesis menyatakan bahwa faktor-faktor penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_1), kompetensi aparatur (X_2) dan peran audit internal (X_3) berpengaruh terhadap Kualitas informasi laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.

Model yang digunakan adalah:

Tabel 3
Tabel Pengaruh variabel bebas terhadap
Kualitas informasi laporan keuangan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,047	,318		-3,290	,002
Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_1)	,452	,072	,317	6,024	,000
Kompetensi aparatur (X_2)	,269	,082	,253	3,281	,003
Peran audit internal (X_3)	,437	,094	,285	4,643	,000

Sumber: Hasil Penelitian, 2022 (Data diolah)

Berdasarkan hasil SPSS varsi 23 seperti terlihat tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut,

$$Y = -1,047 + 0,452X_1 + 0,269X_2 + 437X_3$$

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Martaningsih (2016) dan Rahmawati (2018) karena variabel yang diteliti sama-sama berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah sebesar 0,452 yang berarti penerapan standar akuntansi pemerintahan mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Hasil analisis menunjukkan nilai β_1 sebesar 0,452 dengan hasil perhitungan $\beta_1 \neq 0$, dapat disimpulkan penerapan standar akuntansi pemerintahan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk kompetensi aparatur adalah sebesar 0,269 yang berarti kompetensi aparatur mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Hasil analisis menunjukkan nilai β_2 sebesar 0,269 dengan hasil perhitungan $\beta_2 \neq 0$, dapat disimpulkan kompetensi aparatur secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.

Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk peran audit internal adalah sebesar 0,437 yang berarti peran audit internal mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Hasil analisis menunjukkan nilai β_3 sebesar 437 dengan hasil perhitungan $\beta_3 \neq 0$, dapat disimpulkan peran audit internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.

SIMPULAN

1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintahan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.
3. Kompetensi aparatur secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.
4. Peran audit internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten SKPD Kabupaten Aceh Besar.

DAFTAR PUSTAKA (Times New Roman 12; Bold; Line Spacing 1.5)

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Suatu Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Baridwan, Zaki. (2018). *Sistem Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Dagong, S. (2018). *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Gorontalo (Studi Kasus DPPKAD Kota Gorontalo)*. Skripsi Sarjana Ekonomi UNG.
- Fikri, Ali (2015) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). *Jurnal, Universitas Mataram NTB*
- Fitri, F. (2019). Pengaruh Beban Kerja, Motivasi, Dan Integritas Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Dan Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 4, No. 4, Hlm 694-703
- Ghozali, Imam (2017) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim dan Kusufi. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Handayani, P. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 16, No. 1, Hlm 270 – 279*
- Harahap, S. S. (2018). *Teori Akuntansi. Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada
- Hasanah, S., & Siregar. T. R. S. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No.1*
- Hasibuan, M. (2017) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), (2018). *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*, Jakarta: Salemba Empat



- Kasmir. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lasmara, F. & Rahayu, S. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 4*.
- Lesmana, H. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas laporan Keuangan di Kelurahan Pasarbatang. *Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No.1*